

# Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Sri Listiyani<sup>1</sup>, Arwan Gunawan<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, Bandung 40012

E-mail: sri.listiyani.amp16@polban.ac.id

<sup>2</sup>Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, Bandung 40012

E-mail: arwan.gunawan@polban.ac.id

## ABSTRAK

Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat sejak tahun 2014-2018 memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP) hal tersebut dikarenakan masih terdapat temuan-temuan yang mengakibatkan laporan keuangan tidak dapat diyakini kewajarannya, dengan begitu dapat dikatakan bahwa kualitas laporan keuangan masih belum optimal. Adapun upaya yang dilakukan yaitu dengan menerapkan sistem pengendalian intern dalam meningkatkan pengendalian penyelenggaraan pemerintah, selain itu untuk menghindari keterbatasan pemahaman dalam menyusun laporan keuangan maka dapat dilihat dari kompetensi sumber daya yang dimilikinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Jenis penelitian adalah kuantitatif deskriptif dengan metode survey. Data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Sampel dipilih menggunakan teknik *purposive-sampling* berjumlah 99 sampel yang tersebar pada 28 Satuan Kerja Perangkat Daerah. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda yang diolah menggunakan *software SPSS versi 26.0*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Adapun secara simultan berpengaruh sebesar 54,5% sedangkan sisanya sebesar 45,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Peningkatan kualitas laporan keuangan dapat diwujudkan melalui peningkatan penerapan sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki.

### Kata Kunci

*Penerapan sistem pengendalian intern (SPI), Kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan Kualitas laporan keuangan*

## 1. PENDAHULUAN

Laporan keuangan yang disusun harus mampu menggambarkan posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah selama satu periode pelaporan, laporan keuangan akan mendapat penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam bentuk opini [16]. Namun pada kenyataannya dalam laporan keuangan masih terdapat kesalahan data yang disajikan, padahal laporan keuangan merupakan laporan yang sangat diandalkan oleh banyak pihak sebagai dasar dalam pengambilan keputusan [20]. Berdasarkan pemeriksaan BPK terhadap 542 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018 maka diperoleh data sebanyak 443 beropini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 86 beropini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) serta 13 beropini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) [6]. Adapun daerah di Jawa Barat yang masih mendapat opini WDP adalah Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung Barat [11]. Kabupaten Bandung Barat selama lima tahun berturut turut (2014 – 2018) memperoleh opini WDP atas LKPD yang disusunnya hal tersebut diketahui karena masih terdapat beberapa temuan mengenai sistem

pengendalian intern (SPI) diantaranya terdapat permasalahan penatausahaan persediaan yang kembali terjadi pada tahun 2018 diantaranya terjadi pada Dinas PUPR dimana UPT yang berada dalam naungan dinas tidak mencatatkan pengeluaran persediaan, kemudian adanya perbedaan pencatatan persediaan yang terjadi pada Dinas Kesehatan dan DP2KBP3A, serta adanya selisih barang yang terjadi pada RSUD Cikalong Wetan. Kemudian adanya permasalahan aset yang terus berulang setiap tahunnya seperti tanah seluas 17.400 m2 atau senilai Rp. 1.113.600.000 belum diketahui keberadaannya, kemudian pelaksanaan sertifikasi tanah yang belum optimal hal tersebut diketahui sebanyak 52 aset masih dalam proses sertifikasi sehingga BPK belum mendapatkan data pencocokan antara data bidang tanah dan KIB A lalu sebanyak 13 aset senilai Rp13.685.245.250,00 belum disertifikasi, aset tanah, gedung dan bangunan, jalan dan irigasi tidak data luas dan letaknya, lalu penerimaan hibah sebanyak 20 aset belum dicatat dan aset yang sudah dimanfaatkan belum dibuat berita acaranya. Selanjutnya adanya pemanfaatan aset sebanyak 8 aset oleh pihak ketiga yang tidak didukung oleh

surat ketetapan Bupati dan surat kerjasama akibatnya pemerintah kehilangan potensi pendapatan, serta adanya keterlambatan penyaluran dana desa dan pelaporan realisasi dana desa yang tidak tertib [8]. Selanjutnya berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan penulis dengan Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat maka diketahui tingkat maturitas SPI dinilai masih rendah yaitu 1,4 (rintisan) yang menandakan bahwa pengendalian intern telah diterapkan namun untuk pendekatan risiko masih belum diterapkan serta pengendalian yang dilakukan juga tidak terorganisasi dengan baik sehingga kelemahan tidak mampu diidentifikasi. Penerapan SPI sangat dibutuhkan pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar memperoleh kepercayaan dari masyarakat karena masyarakat percaya jika pemerintah sudah menerapkan SPI maka pengendalian dan manajemen risiko dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintah telah dilaksanakan [2]. Selanjutnya adanya kasus korupsi yang terjadi juga mendukung peraihan opini WDP saat ini [7]. Dari uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa SPI sangat mempengaruhi kualitas laporan keuangan, sehingga dibutuhkan penerapan SPI yang kuat untuk menghindari risiko yang mungkin terjadi yang dapat menurunkan kualitas laporan keuangan pemerintah [10]. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani, dkk (2018) [14], Afri (2018) [10] dan Aulia, dkk (2019) [1] yang memiliki pendapat yang sama bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

Selanjutnya faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah sumber daya manusia (SDM), sebab daerah yang masih mendapatkan opini WDP seringkali kekurangan SDM yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi [3]. SDM adalah salah satu faktor pendukung dalam kesuksesan penyusunan laporan keuangan, namun kesuksesan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh SDM saja melainkan didukung juga oleh kompetensi yang dimilikinya dalam bidang akuntansi [4]. Pada kenyataannya masih sering ditemui pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan aparatur pengelola keuangan yang memiliki latar belakang dalam bidang akuntansi sehingga dapat menimbulkan kelemahan-kelemahan yang disebabkan keterbatasan pemahaman [17]. Meskipun sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah memadai untuk penyusunan laporan keuangan namun tetaplah sumber daya manusia menjadi faktor kunci yang memiliki peran besar dalam kesuksesan penyusunan laporan keuangan karena tanpa adanya SDM yang berkompeten maka sulit untuk mendapatkan hasil yang optimal [21]. Fenomena yang terjadi sebanyak 85,9% SDM yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan tidak memiliki latar belakang akuntansi. Disamping itu berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan

penulis maka menurut Kasubag Akuntansi BPKD mengatakan bahwa kompetensi SDM sangat penting dalam penyusunan laporan keuangan agar lebih efektif dan efisien, namun pada kenyataannya bagian keuangan tiap SKPD masih kekurangan SDM yang memiliki latar belakang akuntansi sehingga SDM kurang paham mengenai laporan keuangan yang menyebabkan laporan keuangan sering terlambat untuk di input atau seringkali dikembalikan ke SKPD yang bersangkutan karena penyusunan laporan keuangannya tidak sesuai dengan ketentuan sehingga dapat menghambat proses penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten, jika kesalahan tersebut terus terjadi hingga pemeriksaan oleh BPK berlangsung maka hal tersebut akan menjadi temuan BPK yang menyebabkan penundaan pemberian opini WTP dari BPK. Penelitian Zahra (2017) [22], Zubaidi, dkk (2019) [23] dan Maria (2019) [19] mengatakan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian intern, kompetensi SDM dan kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, serta untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem pengendalian intern dan kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan baik secara parsial maupun simultan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai referensi bagi akademisi maupun peneliti selanjutnya dalam pengembangan ilmu akuntansi pemerintahan serta diharapkan dapat memberikan saran sehingga ikut berkontribusi dalam peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

## **2. LANDASAN TEORI**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 [12] Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dimaksud dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yaitu:

“Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan”. Terdapat lima unsur pada SPIP yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

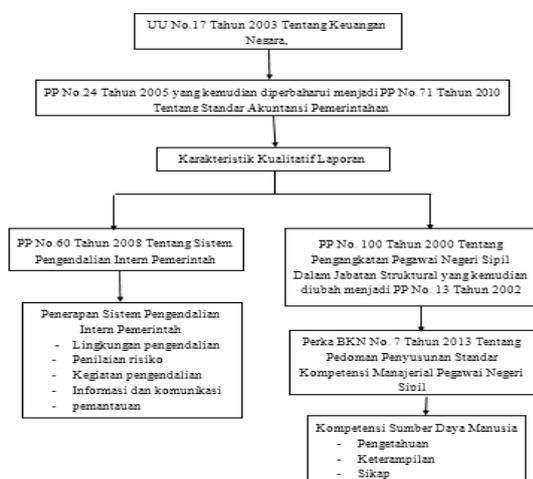
Selanjutnya Spancer & Spancer (1993:9) [18] mengatakan bahwa “Kompetensi adalah dasar dari seorang individu yang secara kausal berkaitan dengan kinerja efektif yang direferensikan dan/atau unggul dalam suatu pekerjaan atau situasi”.

Sedangkan yang dimaksud dengan SDM adalah elemen yang sangat penting dalam organisasi yang memiliki potensi dalam membantu organisasi mencapai tujuannya. Menurut Hutapea dan Thoha (2008:28) [5] menyebutkan bahwa terdapat tiga komponen utama dalam membentuk kompetensi yang baik, yaitu pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan Sikap (*Attitude*).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 [13] Tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyebutkan bahwa “Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi – transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”. Laporan keuangan pemerintah terdiri dari 7 komponen yaitu LRA, LO, Neraca, LAK, LPE, Laporan Perubahan SAL dan CaLK. Selanjutnya yang dimaksud dengan karakteristik laporan keuangan merupakan ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik tersebut terdiri dari:

1. Relevan, apabila informasi yang terkandung didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu pengguna dalam mengevaluasi peristiwa
2. Andal, apabila laporan keuangan tersebut terbebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, kemudian menyajikan fakta secara jujur serta dapat diverifikasi.
3. Dapat dibandingkan, jika laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya atau laporan keuangan yang terdapat pada entitas lain dapat dipahami, harus disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah sesuai dengan pemahaman pengguna.

Adapun bagan kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian sebelumnya maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

- H<sub>1</sub>: Penerapan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
- H<sub>2</sub>: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
- H<sub>3</sub>: Penerapan sistem pengendalian intern dan Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan metode survey. Objek yang digunakan adalah kualitas laporan keuangan sedangkan subjek menggunakan SKPD yang berada dalam Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Penelitian dilakukan menggunakan *setting* alamiah yaitu dengan melakukan studi lapangan. Adapun horizon waktu yang digunakan yaitu *cross section*.

Populasi dalam penelitian ini adalah pejabat yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan dari tiap SKPD yang terdiri dari Kepala SKPD, Kasubag Keuangan, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor. 41 Tahun 2018 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat. Sampel diambil melalui *non-probability sampling* dengan teknik *purposive-sampling* sehingga didapat 99 sampel dari 28 SKPD.

Variabel yang digunakan adalah penerapan sistem pengendalian intern (X1) dan variabel kompetensi sumber daya manusia (X2) sebagai variabel independen serta variabel kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan data subjek yang berasal dari opini seseorang (responden). Selanjutnya sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan kuesioner dengan *skala likert*. Data yang diperoleh dari kuesioner merupakan data ordinal yang harus dirubah menjadi data interval melalui *Method of Successive Interval (MSI)* dengan bantuan *Mircosof Excel* (Riduwan dan Sunarto, 2011:20) [15]. Adapun uji kualitas data dilakukan melalui uji validitas dan uji reliabilitas serta uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas.

Kemudian untuk mengetahui kondisi sebenarnya dilapangan maka dilakukan analisis statistik deskriptif. Selanjutnya data dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan persamaan

sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + \varepsilon \quad (1)$$

Keterangan:

- Y = Kualitas laporan keuangan
- a = Konstanta
- b<sub>1</sub> = Koefisien regresi variabel X<sub>1</sub>
- b<sub>2</sub> = Koefisien regresi variabel X<sub>2</sub>
- X<sub>1</sub> = Penerapan sistem pengendalian intern
- X<sub>2</sub> = Kompetensi SDM
- ε = Error

Selanjutnya pada pengujian hipotesis menggunakan uji T untuk melakukan analisis parsial, uji F untuk melakukan analisis simultan dan uji koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji validitas yang dilakukan terhadap seluruh variabel menghasilkan nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$  dengan  $r_{tabel}$  sebesar 0,195 sehingga dikatakan telah valid. Sedangkan untuk uji reliabilitas seluruh variabel menghasilkan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,70 sehingga dikatakan telah reliabel. Adapun analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian intern memiliki nilai min sebesar 71, max sebesar 111 dan *mean* sebesar 96,46 kemudian kompetensi sumberdaya manusia memiliki nilai min sebesar 42, max sebesar 67 dan *mean* sebesar 57,06 lalu kualitas laporan keuangan memiliki nilai min sebesar 30, max sebesar 50 dan *mean* sebesar 42,19. Seluruh variabel memiliki nilai *mean* mendekati nilai *max* yang berarti rentang jawaban responden berada pada kategori setuju dan sangat setuju.

Selanjutnya berdasarkan uji normalitas melalui uji *Kolmogorov-Smirnov* diketahui nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 > 0,05 maka data dalam penelitian dapat dikatakan telah berdistribusi normal. Kemudian berdasarkan uji multikolinieritas diketahui nilai *tolerance* penerapan sistem pengendalian intern maupun kompetensi sumber daya manusia sebesar 0,788 > 0,10 sedangkan nilai *VIF* sebesar 1,269 < 10, maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas sehingga dapat dikatakan model regresi sudah baik. Adapun uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik *scatter plot* yang menunjukkan titik-titik menyebar secara tidak beraturan di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y sehingga dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Sedangkan analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.846	2.875		.990	.325
	Penerapan SPI	.149	.043	.271	3.490	.001
	Kompetensi SDM	.394	.053	.574	7.402	.000

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan Tabel 1 tersebut maka dapat dibuat persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + \varepsilon \quad (2)$$

$$\text{Kualitas Lapkeu} = 2,846 + 0,149 * \text{Penerapan SPI} + 0,394 * \text{Kompetensi SDM} + e \quad (3)$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat diketahui bahwa jika nilai penerapan sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia bernilai 0 maka kualitas laporan keuangan memiliki nilai sebesar 2,846. Nilai koefisien regresi dari persamaan tersebut adalah positif yang berarti arah pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah positif.

Selanjutnya uji t terhadap variabel independen menghasilkan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dengan  $t_{hitung}$  masing - masing sebesar 3,490 dan 7,402 sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 1,660 kemudian untuk nilai signifikansi (*Sig.*) masing - masing variabel independen menghasilkan nilai *Sig* > 0,05 dengan masing - masing signifikasni sebesar 0,001 dan 0,000 sehingga secara parsial setiap variabel independen berpengaruh secara positif dan signifikan, maka dapat diartikan bahwa seiring dengan semakin baiknya penerapan sistem pengendalian intern maupun kompetensi sumber daya manusia maka kualitas laporan keuangan juga akan semakin membaik. Adapun uji f yang dilakukan menghasilkan nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau 57,608 > 3,090 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 maka secara simultan variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen. Kemudian analisis koefisien determinasi dilakukan dengan melihat nilai  $R^2$  adapun nilai  $R^2$  dalam penelitian ini sebesar 0,545 atau 54,5% nilai tersebut mengandung arti bahwa penerapan sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh sebesar 54,5% terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan sisanya sebesar 45,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian seperti *Good Governance*, *Pemanfaatan Teknologi Informasi* dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis yang dilakukan maka telah mengkonfirmasi penelitian yang dilakukan oleh Afri (2018) [9] yang menyatakan bahwa sistem pengendalian inttern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

sebab penerapan sistem pengendalian intern yang memadai akan meningkatkan keyakinan terhadap kualitas laporan keuangan yang telah disusun.

Selanjutnya hasil analisis dan uji hipotesis yang dilakukan juga telah mengkonfirmasi penelitian yang dilakukan oleh zahra (2019) [22] yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan hal tersebut ditunjukkan dengan kemampuan bekerja berdasarkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hal tersebut sejalan dengan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat salah satunya yaitu dengan melakukan *bimtek* mengenai sistem pengendalian intern untuk menanamkan pemahaman mengenai pengendalian terhadap kegiatan yang dilakukan serta adanya upaya melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pengembangan karir atau dengan melakukan tahap *assasment* ketika akan menduduki suatu jabatan.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan, hal tersebut dikarenakan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,490 lebih besar dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,660 dan nilai signifikansi sebesar  $0,001 < 0,05$  yang berarti  $H_{01}$  ditolak dan  $H_{a1}$  diterima sehingga jika penerapan sistem pengendalian intern meningkat maka akan berimplikasi pada peningkatan kualitas laporan keuangan.
2. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan, hal tersebut dikarenakan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 7,402 lebih besar dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,660 dan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  yang berarti  $H_{02}$  ditolak dan  $H_{a2}$  diterima sehingga jika kompetensi sumber daya manusia meningkat maka akan berimplikasi pada peningkatan kualitas laporan keuangan.
3. Penerapan sistem pengendalian intern dan Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan, hal tersebut dikarenakan nilai  $F_{hitung}$  sebesar 57,608 lebih besar dari  $F_{tabel}$  sebesar 3,090 dengan signifikansi  $0,000 < 0,05$  yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima sehingga jika penerapan sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia meningkat maka akan berimplikasi pada peningkatan kualitas laporan keuangan. Selanjutnya nilai koefisien detriminasi ( $R^2$ ) sebesar 0,545 atau 54,5% yang menunjukkan

bahwa penerapan sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh sebesar 54,5% terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan sisanya sebesar 45,5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Penerapan sistem pengendalian intern sudah berjalan dengan baik namun hal tersebut dapat dioptimalkan menjadi semakin baik jika ada komitmen antara pimpinan dan pegawai lainnya untuk menjalankan 5 unsur yang mendukung penerapan sistem pengendalian intern secara berkala, khususnya pada unsur pemantauan pimpinan dan pihak yang terkait harus memberikan perhatian lebih terhadap kelengkapan catatan akuntansi dan kelengkapan dalam penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah serta adanya kerjasama yang baik dari semua pihak untuk menindaklanjuti segala temuan dalam laporan keuangan sehingga mampu meminimalisir kesalahan pada laporan keuangan.
2. Inspektorat Kabupaten Bandung Barat diharapkan memperbanyak jadwal bimtek/sosialisasi/ workshop kepada setiap SKPD sehingga setiap perangkat daerah diharapkan mampu membuat manajemen risiko yang spesifik untuk mengimplementasikan risiko yang mungkin terjadi, membuat peta risiko, dan membuat strategi untuk mengurangi atau menghindari risiko tersebut khususnya dalam hal penyusunan keuangan.
3. Apabila terdapat penambahan sumber daya manusia pada bagian keuangan alangkah lebih baik jika sumber daya manusia tersebut memiliki latar belakang pendidikan akuntansi sehingga memiliki bekal mengenai dasar akuntansi karena sudah mengenal istilah – istilah dalam akuntansi yang diharapkan akan mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat harus memperbanyak jadwal pembinaan dan pelatihan mengenai keuangan hal tersebut didasarkan pada sebagian besar pihak yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan tidak memiliki latar pendidikan yang linier dengan tanggung jawabnya, hal tersebut dilakukan untuk menanggulangi permasalahan keterlambatan pelaporan keuangan SKPD yang disebabkan laporan keuangan yang dilaporkan tidak lengkap sehingga sering mengalami revisi yang memakan waktu cukup lama
5. Sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat menerapkan sistem *reward and punishment* dalam hal penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh setiap SKPD selain untuk meningkatkan motivasi bekerja juga untuk memberikan sanksi bagi SKPD yang

dianggap tidak serius dalam membuat laporan keuangan.

6. Apabila terdapat peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian dengan permasalahan yang serupa maka disarankan untuk memperluas sampel dan menambah variabel yang digunakan mengingat 45,5% variabel lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan tidak termasuk dalam penelitian ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aulia, Alfi, Budi Susetyo & Teguh Budi Raharjo. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusi, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis AkruaI dan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Permana: Jurnal Perpajakan, Ekonomi dan Akuntansi Vol. 11 No 2*, 83-96.
- [2] BPKAD Kabupaten Banjar (2019). *Pentingnya SPIP untuk Mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian*. Retrieved from <https://bpkad.banjarkab.go.id>
- [3] Dinilah, M. (2018). *BPK Jabar Sarankan Daerah yang Meraih WDP Perbanyak Tenaga Akuntan*. Retrieved from <https://new.detik.com/berita-jawa-barat/d-4045925/bpk-jabar-sarankan-daerah-yang-meraih-wdp-perbanyak-tenaka-akuntan>
- [4] Hanafi, Ranny. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- [5] Hutapea, Parulian, & Nuriana, Thoha (2008). *Kompetensi Plus*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- [6] Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK RI Tahun 2019. (n.d.).
- [7] Kamaludin, Hilman. (2019). *Pemkab Bandung Barat Gagal Raih WTP, Akibat Diterpa Kasus Korupsi RSUD Lembang*. Retrieved from <https://jabar.tribunnews.com/2019/08/07/pemkab-bandung-barat-gagal-raih-wtp-akibat-diterpa-kasus-korupsi-rsud-lembang>
- [8] LHP BPK RI atas LKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018. (n.d.).
- [9] Mulia, Rizki Afri. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal El-Riyasah Vol. 9 No. 1*.
- [10] Mulyadi & Haryoso, P. (2019). Peranan Sistem Pengendalian Internal dan Penggunaan Teknologi Informasi dalam Menentukan Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota SURakarta. *PROBANK Jurnal Ekonomi dan Perbankan Vol. 4 No. 1*, 78-97.
- [11] Nursanti, Ari. (2019). *24 Kabupaten/Kota di Jawa Barat raih Opini WTP dari BPK*. Retrieved from <https://www.pikiran-rakyat.com/advertorial/pr-01312954/24-kabupatenkota-di-jawa-barat-raih-opini-wtp-bpk>
- [12] PP No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. (n.d.).
- [13] PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (n.d.).
- [14] Ramadahani, Melati, Ayu Noorida Soerono & Wisnu Mulyasari. (2018). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Teknologi Informasi dan Pemahaman Basis AKruaI terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Terpadu Vol. 12 No. 1*, 40-63.
- [15] Riduwan, & Sunarto. (2011). *Pengantar Statistika untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi, dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- [16] Sholohah, Silvia Arma'atus & Aridani Ika Sulistyawati. (2019). Kualitas Laporan Keuangan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. *Fokus Ekonomi Vol. 13 No. 2*.
- [17] Siahaya, Erwin, Meinarni Asnawi & Pulus K. Allo Layuk. (2018). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Keuda Jurnal Vol. 3 No 1*.
- [18] Spencer, Lye & Signe M. Spancer. (1993). *Competence at Work, Models for Superior Performance*. Canada: John Willey & Sons, Inc.
- [19] Suryanigksih, Maria. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Profiet Vol. 3 No. 1*, 174-189.
- [20] Triyanti, & Mustikawati, I. (2018). Pengaruh Sumber Daya Manusia di Bidang AKuntansi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Provita Vol. 6 No. 3*.
- [21] Yudi, Rahayu, S., & Rahayu. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penyusunan Laporan Keuangan. *JAKU UNJA Vol. 3 No. 1*, 50-58.
- [22] Zahra, S., Ridwan, & Nurhayati. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM dan Manajerial terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *E-Journal Katalogis Vol. 5 No. 3*, 201-210.
- [23] Zubaidi, N., Cahyono, D., & Maharani, A. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *International Journal of Social Science and Business Vol. 3 No. 2*, 68-76.